



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AMIN PURWANI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 252459

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.177.800.307

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 330.412.307
2. Tanah Seluas 338 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 207.532.000
3. Tanah Seluas 591 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 274.224.000
4. Tanah Seluas 788 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 365.632.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 287.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 20.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 117.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.601.800.307

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.601.800.307

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.